

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
DI SMA NEGERI 1 KASIHAN BANTUL**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Pendidikan Islam

Disusun oleh :

**Siti Nurkasanah**

NIM. 08410187

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2013**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurkasanah

NIM : 08410187

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain

Yogyakarta, 16 April 2013

Yang menyatakan



Siti Nurkasanah

NIM. 08410187



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp: 3 eksemplar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Siti Nurkasanah  
NIM : 08410187  
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul.

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 April 2013  
Pembimbing

Dr. H. Tasman Hamami, M.A  
NIP. 19611102 198603 1 003



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.2/DT/PP.01.1/371/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN  
AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 1 KASIHAN BANTUL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Nurkasanah

NIM : 08410187

Telah dimunaqsyahkan pada : Hari Selasa tanggal 14 Mei 2013

Nilai Munaqsyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQSYAH :**

Ketua Sidang

Dr. Tasman, M.A  
NIP. 19611102 198603 1 003

Penguji I

Dr. Sukiman, M.Pd  
NIP. 19720315 199703 1 009

Penguji II

Drs. Rofik, M.Ag  
NIP. 19650405 199303 1 002

Yogyakarta, 26 JUN 2013

Dekan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Sunan Kalijaga



Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si  
NIP. 19590525 198503 1 005

## MOTTO

... وَعَظُّهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya: . . . “Dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.” (QS. An-Nisa’:63)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal. 129

# **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Almamater Tercinta Jurusan Pendidikan Agama Islam*

*Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انّ محمّدا رسول الله و الصلاة  
و السّلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun dalam prosesnya banyak sekali halangan dan hambatan. Namun demikian, penulis sadari dengan sepenuh hati bahwa ini adalah benar-benar pertolongan Allah swt.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang patut dicontoh. Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua dan Sekertaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Tasman Hamami, M.A selaku pembimbing sekaligus Penasehat Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
5. Kepala Sekolah beserta para guru dan karyawan SMA Negeri 1 Kasihan Bantul.
6. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Kasihan Bantul.
7. Bapak dan Ibu tercinta serta seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan masukan untuk skripsi saya.
9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah swt. dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Yogyakarta, 15 April 2013  
Penyusun

Siti Nurkasanah  
NIM. 08410187



## ABSTRAK

SITI NURKASANA. Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa masalah korupsi menjadi salah satu problem kronis bangsa yang saat ini sedang membutuhkan upaya penyelesaian secara mendesak. Untuk mengatasi hal tersebut, pendidikan ditempatkan pada posisi yang strategis. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menerapkan Pendidikan Antikorupsi dalam kurikulum sekolah sebagai salah satu upaya pencegahan di tengah menjamurnya praktik korupsi di Indonesia. SMA Negeri 1 Kasihan Bantul menjadi salah satu sekolah yang tengah mengupayakan integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulumnya, khususnya pada mata pelajaran PAI dan PKn. Yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum PAI di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul, bagaimana implementasinya dalam pembelajaran, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, dan bagaimana bentuk evaluasi serta hasilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai antikorupsi yang terkandung dalam kurikulum PAI, bagaimana implementasinya dalam pembelajaran di kelas, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya dan bagaimana bentuk evaluasi serta sejauh mana hasil yang dapat dicapai dari upaya tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar SMA Negeri 1 Kasihan Bantul. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala bidang kurikulum, para guru khususnya guru PAI, dan siswa SMA Negeri 1 Kasihan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mengadakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan dari makna itulah ditarik kesimpulan dengan memaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Nilai-nilai antikorupsi yang terkandung dalam kurikulum PAI di SMA Negeri 1 Kasihan adalah kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kedisiplinan, kerja keras, peduli, berani, sederhana, dan mandiri. (3) Implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran dilakukan dengan menekankan nilai-nilai tersebut ketika menjelaskan muatan Pendidikan Agama Islam, juga dengan memberikan wawasan terkait materi-materi antikorupsi kepada peserta didik di sela-sela materi pembelajaran sebagai pengantar atau bahkan sebagai ulasan dan kesimpulan dari materi pokok yang relevan. Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam PAI bersifat *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi), sehingga termasuk di dalamnya adalah nilai keteladanan, sikap, dan pembiasaan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Landasan Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	32
G. Sistematika Pembahasan .....	37
BAB II: GAMBARAN UMUM SMA NEGERI 1 KASIHAN BANTUL...	39
A. Letak Geografis .....	39
B. Sejarah Singkat Berdiri dan Proses Perkembangannya .....	40
C. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan .....	41
D. Struktur Organisasi .....	44
E. Keadaan Guru dan Karyawan .....	46
F. Keadaan Siswa .....	47
G. Keadaan Sarana dan Prasarana .....	48

BAB III: PENANAMAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 1 KASIHAN BANTUL .....	51
A. Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam .....	51
B. Implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam .....	83
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) .....	85
2. Proses Pembelajaran .....	90
3. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	103
4. Evaluasi dan Hasil Pembelajaran.....	105
BAB IV: PENUTUP .....	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
C. Kata Penutup.....	114
DAFTAR PUSTAKA .....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	121

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I : Daftar kepemimpinan SMA Negeri 1 Kasihan Bantul dari periode pertama hingga sekarang.....	41
Tabel II : Keadaan Siswa SMA N 1 Kasihan.....	48
Tabel III : Daftar materi PAI yang relevan dengan nilai antikorupsi .....	78

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Struktur Organisasi SMA N 1 Kasihan.....	45
Gambar 2 : Foto kegiatan belajar mengajar .....	92
Gambar 3 : Foto kegiatan belajar mengajar saat diskusi berlangsung .....	93
Gambar 4 : Foto poster antikorupsi di SMA N 1 Kasihan.....	102

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Pengumpulan Data.....	120
Lampiran 2 : Catatan Lapangan .....	123
Lampiran 3 : Silabus PAI.....	135
Lampiran 4 : RPP PAI .....	141
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	158
Lampiran 6 : Surat Ijin Penelitian .....	159
Lampiran 7 : Sertifikat PPL-KKN .....	161
Lampiran 8 : Sertifikat TOEFL.....	163
Lampiran 9: Sertifikat TOAFL .....	164
Lampiran 10: Sertifikat ICT.....	165
Lampiran 11: Daftar Riwayat Hidup .....	166

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik seputar problem yang menyangkut tatanan nilai dan sangat menuntut adanya upaya pemecahan secara mendesak. Salah satu dari problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat adalah problematika korupsi yang tak kunjung usai. Karena semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya dan harus segera diperangi bersama.

Indikasi tingginya tingkat korupsi di Indonesia ditunjukkan oleh beberapa hasil survei yang telah dilakukan oleh lembaga Transparency International (TI). Pada tahun 2011 lalu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebesar 3,0 di mana angka tersebut masih di bawah negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia (4,3), dan Thailand (3,4). Untuk peringkat, Indonesia berada di urutan ke-100 dari 182 negara.<sup>2</sup>

Di tahun 2012 kemarin, ternyata Indonesia belum juga mampu menunjukkan prestasi signifikan dalam pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari hasil IPK yang diperoleh Indonesia sebesar 32 dengan peringkat yang turun, dari 100 menjadi 118. Secara regional, Indonesia tidak mengalami banyak perubahan. Indonesia masih berada di jajaran bawah apabila

---

<sup>2</sup>Ary Wibowo, *Indonesia Peringkat Ke-100 Indeks Persepsi Korupsi 2011*, [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), 2012, diunduh pada tanggal 19 Oktober 2012 pukul 15.30.

dibandingkan dengan skor IPK di negara-negara Asia Tenggara, seperti Singapura yang di tahun 2012 lalu meraih skor 87, Brunai Darussalam (55), Malaysia (49), Thailand (37), dan Filipina (34). Bahkan dengan IPK 32 ini, Indonesia masih di bawah negara Timor Leste yang skornya 33.<sup>3</sup>

Korupsi memang merupakan problematika yang cukup pelik yang melilit dan menghinggap di hampir seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Begitu seringnya kata itu dikonsumsi publik hingga korupsi seakan kehilangan makna sejatinya sebagai sesuatu yang buruk. Korupsi sudah tak dihiraukan lagi sebagai sesuatu yang tabu. Layaknya gosip yang hangat dan terus diperbincangkan. Pada akhirnya pelaku korupsi pun tak lagi malu untuk melakukan aksinya tanpa *tedeng aling-aling*.

**Pemerintah** telah membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2002 lalu berdasarkan UU Nomor 30, disusul dengan Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Namun lembaga tersebut nyatanya belum mampu menurunkan jumlah praktik korupsi yang semakin marak. Tak pandang bulu, korupsi merambah di berbagai lini. Mulai dari politik, pendidikan, hingga Kementerian Agama. Tak tanggung-tanggung, pengadaan kitab suci pun dikorupsi oleh pihak yang dianggap “bersih”. Masyarakat benar-benar dibuat geleng kepala berkali-kali. Setiap hari berita yang tersaji pada media cetak maupun elektronik seolah tak pernah ketinggalan dengan kasus korupsi. Tema yang sama dengan subjek yang berbeda dan penyelesaian hukum yang tak kunjung usai.

---

<sup>3</sup> Sabrina Asril, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Kalah dari Timor Leste*, 2012, kompas.com, diunduh pada tanggal 31 Maret pukul 14.00.



Genderang perang terhadap tindak pidana korupsi telah ditabuhkan oleh segenap warga negara Indonesia berikut pemerintahannya. Patut dicatat pula bahwa presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam salah satu pidatonya pada momen kampanye Pilpres 2009 telah berjanji akan menghunus pedang di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.<sup>4</sup> Keseriusan pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi diwujudkan salah satunya dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Sebagai tambahan, pemerintah juga memasukkan upaya baru, yakni pendidikan dan budaya antikorupsi. Fokusnya berupa pendidikan karakter bangsa yang berintegritas serta kampanye antikorupsi.<sup>5</sup> Selain itu, kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerapkan Pendidikan Antikorupsi dalam kurikulum sekolah mulai tahun ajaran 2012/2013 seolah menemukan momentumnya di tengah menjamurnya praktik korupsi di Indonesia.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi yang telah diwacanakan diharapkan dapat menjadi cara yang relevan untuk menekan tindak korupsi yang sudah membudaya di negara ini. Dalam konteks pembangunan budaya bangsa antikorupsi, pendidikan sangat berperan untuk memelihara norma dan nilai kehidupan positif masyarakat dari pengaruh budaya korupsi.

---

<sup>4</sup> Ira Oemar, *Refleksi Badai di Tubuh Partai Demokrat*, [www.politik.kompasiana.com](http://www.politik.kompasiana.com), 2012, diunduh pada tanggal 14 Maret 2013 pukul 13.00.

<sup>5</sup> Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), *Pemerintah Luncurkan Langkah-Langkah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi 2012*, <http://www.ukp.go.id>, 2012, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2012 pukul 14.30.

<sup>6</sup> Adi Suhendi, *KPK–Kemendikbud Kerjasama Terapkan Pendidikan Antikorupsi*, [Tribunnews.com](http://Tribunnews.com), 2012, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2012 pukul 14.25.

Pendidikan antikorupsi sejalan dengan pendidikan karakter yang mulai gencar diwacanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang telah terintegrasi dalam kurikulum mata pelajaran yang sudah ada diyakini mampu mencakup nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Hal ini terlihat dalam pernyataan Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto yang menyatakan bahwa fokus dari strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam bidang pendidikan yaitu berupa pendidikan karakter yang berintegritas dan kampanye antikokrupsi.

SMA Negeri 1 Kasihan adalah salah satu sekolah menengah yang saat ini telah menerapkan pendidikan karakter, serta telah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran di sekolah. Beberapa model pembelajaran antikorupsi yang ditempuh oleh sekolah adalah dengan membelajarkan nilai-nilainya mulai dari hal-hal yang sederhana seperti menumbuhkan keberanian peserta didik untuk berani menegur temannya yang membuang sampah sembarangan.<sup>7</sup> Selain tercermin kepedulian, dari sikap tersebut juga mencerminkan sikap berani untuk mengingatkan seseorang yang berlaku salah. Model lain yang ditempuh adalah dengan menyediakan tempat praktek bagi siswa untuk berlatih jujur berupa laboratorium kantin kejujuran. Kantin tersebut tidak dijaga sehingga siswa harus mengambil sendiri barang yang akan dia beli dan membayarnya dengan meletakkan uang di tempat yang telah disediakan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Bapak Drs. H. Suharja, M.Pd., saat prapenelitian, tentang integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum SMA Negeri 1 Kasihan, tanggal 19 November 2012

<sup>8</sup> Hasil wawancara dan observasi saat prapenelitian.

Model lain yang ditempuh oleh sekolah adalah dengan mengencarkan kampanye antikorupsi, salah satunya seperti mengupayakan keberadaan atribut antikorupsi layaknya mading dan poster yang berisi jargon-jargon antikorupsi.<sup>9</sup> Saat ini, dapat terlihat dari upaya-upaya tersebut adalah antusiasme yang kuat dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Kasihan untuk turut aktif dan berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi salah satunya dengan menjadi duta antikorupsi serta aktif dalam komunitas pelajar Pohon Antikorupsi. Menurut pelajar kelas XI SMA Negeri 1 Kasihan Bantul, Bryan Adi Wijaya, yang menjabat sebagai sekretaris Komunitas Pohon Antikorupsi Pelajar DIY, bahwa komitmen yang dipegang anggota komunitas tidak sebatas slogan memerangi perilaku koruptif, melainkan juga mengaplikasikannya pada keseharian sebagai pelajar, seperti tidak mencontek, sebab mencontek merupakan satu bibit korupsi yang bukan tidak mungkin menjadi budaya saat dewasa kelak.<sup>10</sup>

Selain beberapa model pembelajaran yang disebutkan tadi, model pembelajaran antikorupsi lain yang ditempuh oleh sekolah adalah memperbaiki program-program pembelajaran dengan menyisipkan nilai-nilai integritas di dalamnya. Tiga hal yang perlu ditanamkan pada peserta didik, yaitu *morale knowing*, *morale feeling*, dan *morale action*. *Morale knowing* adalah pengetahuan tentang moral, *morale feeling* adalah perasaan mental, dan *morale action* adalah perbuatan moral. *Morale knowing* dan *morale feeling* inilah yang nantinya akan diberikan dan ditumbuhkan pada diri peserta didik

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Hendy Kurniawan, *Pelajar DIY Siap Hadirkan Busyro di Seminar Nasional, Komunitas Pohon Antikorupsi Kesulitan Dana*, Tribun Jogja tanggal 30 April 2013, hal. 9 dan 12.

melalui integrasi pada materi dari mata pelajaran yang sudah ada, terlebih pada mata pelajaran yang bermuatan moral seperti Pendidikan Agama Islam (PAI) dan PKn.<sup>11</sup> Dari data-data tersebut lah kemudian muncul ketertarikan penulis untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana bentuk integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum mata pelajaran yang sudah ada, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang ada di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul, apa saja nilai-nilai antikorupsi yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, dan bagaimana pendidikan antikorupsi diimplementasikan dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kasihan. Menurut hemat penulis, SMA Negeri 1 Kasihan Bantul adalah latar/setting yang cocok digunakan sebagai tempat penelitian dengan judul **“Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian di atas, peneliti mengambil beberapa rumusan masalah yang dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul?
2. Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul?

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Bapak Drs. H. Suharja, M.Pd., saat prapenelitian, tentang integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum SMA Negeri 1 Kasihan, tanggal 19 November 2012

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis: Sebagai wacana dalam menanamkan pendidikan antikorupsi kepada peserta didik lewat Pendidikan Agama Islam.
- b. Kegunaan Praktis: Sebagai usaha pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam.

## **D. Kajian Pustaka**

Agar peneliti mengetahui apakah objek penelitian yang akan dilakukan sudah diteliti atau belum, peneliti melakukan kajian atas penelitian terdahulu, khususnya terhadap penelitian yang relevan dengan tema yang telah dipilih. Sejauh penelusuran yang dilakukan, penelitian yang memfokuskan pada kajian nilai-nilai antikorupsi yang terkandung dalam sebuah kurikulum pendidikan agama Islam di suatu SMA belum ada. Namun terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang telah dipilih, yaitu tentang pendidikan antikorupsi, sebagai berikut:

1. Skripsi saudara Muhammad Mufid dengan judul, “Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Islam”, Yogyakarta: Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2007.<sup>12</sup> Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai pendidikan antikorupsi sebagai solusi alternatif bagi pemberantasan korupsi. Penelitian ini menitik beratkan pembahasan mengenai relevansi antara pendidikan antikorupsi dengan Islam, dan hasilnya terungkap bahwa pendidikan antikorupsi dengan Islam mempunyai relevansi yang sangat terkait. Dilihat dari jenis penelitiannya, skripsi ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena jenis penelitian saudara Muhammad Mufid adalah *library research* atau kepustakaan, sedangkan jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah *field reaserch* atau penelitian lapangan. Sehingga pembahasan tentang bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran sesungguhnya di lapangan jelas belum dibahas oleh skripsi ini.
2. Skripsi saudara Ari Himawan dengan judul, “Bentuk Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Atas”, PAI (Pendidikan Agama Islam) fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2007.<sup>13</sup> Problem dalam skripsi tersebut adalah bentuk integrasi pendidikan antikorupsi dalam Pendidikan

---

<sup>12</sup> Mufid, “Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Islam”, Skripsi, Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

<sup>13</sup> Ari Himawan, “Bentuk Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Atas”, Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Agama Islam, dan hasilnya saudara Ari Himawan menyimpulkan bahwa bentuk integrasi yang dapat diterapkan untuk pendidikan antikorupsi adalah integrasi interkoneksi (dari pola hubungan sirkuler) juga interkoneksi dengan model kajian informatif serta konfirmatif. Penekanan penelitian ini adalah pada penemuan gagasan, pendapat, teori, dalil, dan lainnya, sehingga dalam skripsi ini banyak memaparkan ide-ide penulis dalam memberikan gambaran bentuk integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum PAI. Dilihat dari jenis penelitiannya yang juga *library research*, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

3. Skripsi saudara Bantan Ansori dengan judul, “Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Tingkat SMA”, Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2011.<sup>14</sup> Problem dalam skripsi ini adalah tentang nilai-nilai antikorupsi yang terdapat dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam di tingkat SMA juga urgensi pendidikan antikorupsi dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam di tingkat SMA. Hasilnya terungkap bahwa nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam buku ajar adalah keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan larangan menyembunyikan kesaksian. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*.

Dari beberapa karya ilmiah di atas, dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai pendidikan antikorupsi masih cukup terbatas, serta belum pernah

---

<sup>14</sup> Bantan Ansori, “Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Tingkat SMA”, Jurusan Kependidikan Islam (KI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

dilakukan penelitian yang fokus terhadap pendidikan antikorupsi melalui tinjauan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang telah diterapkan di suatu sekolah. Dengan kata lain, metode *field reaserch* belum pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam meneliti kurikulum Pendidikan Agama Islam terkait dengan pendidikan antikorupsinya, sehingga penelitian ini dapat menjadi pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Nilai-Nilai Antikorupsi**

#### **a. Pengertian Nilai**

Nilai berasal dari bahasa Latin *valere* atau Perancis kuno *valoir* (Encyclopedia of Real Estate Terms, 2002). Sebatas arti denotatifnya, *valere*, *valoir*, *value*, atau nilai dapat dimaknai sebagai harga. Namun dalam memberikan ulasan tentang harga dapat dipersepsikan dari sudut pandang yang berbeda pula.<sup>15</sup>

Nilai telah diartikan oleh para ahli dengan berbagai pengertian, dimana pengertian satu berbeda dengan yang lainnya. Adanya perbedaan pengertian tentang nilai ini dapat dimaklumi oleh para ahli itu sendiri karena nilai tersebut sangat erat hubungannya dengan pengertian-pengertian dan aktivitas manusia yang kompleks dan sulit ditentukan batasannya.

---

<sup>15</sup> Rohmat Mulyana, *Mengartikulasi Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 7.



Nilai artinya sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan.<sup>16</sup> Maksudnya kualitas yang memang membangkitkan respon penghargaan. Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan lembaga secara objektif di dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Dari beberapa pengertian tentang nilai di atas dapat difahami bahwa nilai itu adalah sesuatu yang abstrak, ideal, dan menyangkut persoalan keyakinan terhadap yang dikehendaki, dan memberikan corak pada pola pikiran, perasaan, dan perilaku.

b. Korupsi

Korupsi secara *etimologis* sesuai dengan bahasa aslinya berasal dari bahasa Latin, *corruption* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat atau disuap.<sup>18</sup>

Terma korupsi secara universal selama ini diartikan sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, berakibat merugikan kepentingan umum dan negara. Bentuk nyata tingkah laku korupsi bisa berwujud penggelapan, penyuapan, penyogokan, manipulasi data administrasi keuangan (termasuk *mark up*), pemerasan, penyelundupan, jual beli dukungan politik dan perbuatan sejenis lainnya.

---

<sup>16</sup> WJS Purwadaminata, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 677.

<sup>17</sup> Titus MS, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hal. 122.

<sup>18</sup> Ridlwan Nasir, (Ed.), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, (IAIN Press & LKiS, 2006), hal. 281-282.

Dari beberapa pandangan definitif di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang berupa penyimpangan kekuasaan dan jabatan, privatisasi fasilitas, penyuapan atau penyogokan, penipuan. Kejahatan korupsi lebih eksplisit lagi karena adanya kerugian yang diakibatkan dari tindakan korupsi, seperti kerugian uang negara secara materil.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, *secret transaction*, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

Oleh karenanya dapat diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur di dalamnya: *pertama*, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan *kedua*, pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.<sup>19</sup>

c. Nilai-Nilai Antikorupsi

Menurut Prof. Dr. Jalaluddin, M.A nilai-nilai pendidikan antikorupsi dapat diinterpretasikan melalui lembaga pendidikan dengan cara memahami tata tertib sekolah, menghargai waktu, berlaku jujur, memenuhi tanggung jawab, serta bersikap adil dan berpihak kepada yang benar.<sup>20</sup>

Sedangkan nilai-nilai antikorupsi menurut bahan perkuliahan yang merujuk pada Universitas Paramadina adalah sebagai berikut:

- 1) Larangan suap
- 2) Larangan hadiah bagi pejabat
- 3) Larangan merusak
- 4) Larangan mengambil harta orang lain dengan cara khianat
- 5) Kecharusan jujur
- 6) Kecharusan amanah
- 7) Kecharusan menegakkan keadilan<sup>21</sup>

Menurut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang tertuang dalam bukunya, *Tunas Integritas*, ada sembilan nilai integritas yang

---

<sup>19</sup>Andar Nubowo, Rosita Susi Aryanti, *Membangun Gerakan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan*, (Yogyakarta: LP3 UMY, 2004), hal. 29.

<sup>20</sup>Jalaluddin, dkk, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hal. 189.

<sup>21</sup>Tim dosen bidang pendidikan antikorupsi, *Materi Perkuliahan Pendidikan Antikorupsi Universitas Paramadina*, [www.sladeshare.net](http://www.sladeshare.net), diunduh pada tanggal 21 November 2012 pukul 10.15.

perlu ditanamkan pada anak sejak dini dalam usaha untuk memerangi korupsi. Nilai-nilai antikorupsi tersebut adalah:

- 1) Jujur
- 2) Peduli
- 3) Mandiri
- 4) Disiplin
- 5) Tanggung jawab
- 6) Kerja keras
- 7) Sederhana
- 8) Berani
- 9) Adil<sup>22</sup>

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, yang penting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai, bukan kemahiran menjelaskan tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi, melainkan menggunakan pengetahuan tentang ketaatan terhadap nilai-nilai untuk memupuk kemampuan membimbing individu ke pembaruan cara hidup sesuai realitas yang ada serta aspirasi tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa. Sehingga pelaksanaan konsep pendidikan yang bermaksud mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbaiki sistem nilai akan tercapai.

Dengan demikian pendidikan nilai tidak terhenti pada pengenalan nilai-nilai, masih harus berlanjut ke pemahaman nilai, ke penghayatan nilai, dan ke pengamalan nilai sebagai rangkaian dari proses internalisasi nilai dalam diri maupun pribadi hingga dapat membawa bangsa untuk memperbaiki diri.

---

<sup>22</sup> Ester Lince Napitupulu, *KPK Luncurkan Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Anak Usia Dini*, Kompas.com, 2012, diunduh pada tanggal 21 November 2012 pukul 10.15.

#### d. Penerapan Pendidikan Antikorupsi

##### 1) Strategi Pendidikan Antikorupsi melalui Pendidikan Formal

Strategi pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal dapat dilaksanakan dengan kurikulum yang terdapat di sekolah-sekolah, seperti SD, SMP, SMA, maupun PT. Kurikulum menjadi bagian penting dalam menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi, karena di dalamnya sarat dengan pengetahuan dan pengalaman yang harus diberikan dan dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat mencapai *out come* yang diharapkan.<sup>23</sup> Untuk mencapai *out come* pada diri peserta didik terhadap perilaku antikorupsi, maka kurikulum harus diformat sedemikian rupa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yakni menghasilkan generasi yang tangguh terhadap godaan korupsi serta mampu menghindarkan diri dari kejahatan korupsi.

Mengenai materi pendidikan antikorupsi, secara tegas Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh menyatakan bahwa materi pendidikan antikorupsi tidak akan berbentuk mata pelajaran tersendiri, tetapi akan dimasukkan dalam seluruh mata pelajaran terkait, mengingat kurikulum saat ini sudah sarat beban, sehingga tidak memungkinkan menambah pelajaran baru.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Heru Nugroho, *Mungkinkah Pendidikan menjadi Alternatif Pemberantasan Korupsi?*, (Yogyakarta: KAUB, LP3 UMY dan Yogya Corruption Watch, 2004), hal. 11.

<sup>24</sup> Abdul Majid Hariadi, *Kurikulum Pendidikan Antikorupsi*, *Tribunnews.com*, 2011, diunduh pada tanggal 2 Juni 2013 pukul 19.30.

Namun apa pun alasannya, menurut penulis, pendidikan antikorupsi harus terus menerus diupayakan dan tidak boleh terhenti sampai di tengah jalan. Untuk mensiasati hal ini, penanaman dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi dapat dimasukkan melalui kurikulum yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *hidden curriculum* dan *overt curriculum*.<sup>25</sup> Berikut penjelasan mengenai kedua kurikulum tersebut.

a) *Hidden Curriculum*

*Hidden curriculum* adalah kurikulum yang tidak dipelajari dan tidak direncanakan secara terprogram, tetapi keberadaannya berpengaruh pada perubahan tingkah laku peserta didik.<sup>26</sup> Pendidikan antikorupsi melalui *hidden curriculum*, dapat dilaksanakan dengan cara memberikan suri tauladan yang menampakkan sikap dan perilaku antikorupsi, di antara *stake holder* sekolah, baik peserta didik, guru, kepala sekolah, karyawan maupun pihak yang terkait dengan kondusifnya sistem persekolahan. Tegasnya, jenis kurikulum ini menunjukkan pada kenyataan bahwa para guru dan sekolah terlibat dalam pendidikan moral, tanpa secara eksplisit dan filosofis membahas atau merumuskan tujuan dan metodenya.

---

<sup>25</sup> Amin Abdullah, *Nilai-Nilai Perennial Agama untuk Masyarakat dan Pemerintah Bebas Korupsi: Timbal Balik antara Teori dan Praktek*, aminabd.wordpress.com/2010/06/14, diunduh pada tanggal 12 Juni 2013 pukul 14.30.

<sup>26</sup> Ainurrafiq Dawam, *Hidden Curriculum dalam Islam*, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 6, No. 2, Juli 2005, hal. 257

*Hidden curriculum* atau sering disebut sebagai kurikulum tersembunyi menghendaki adanya tindakan konkret berupa contoh perilaku tindakan antikorupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab maupun sifat adil dengan dimulai dari lingkungan mikro (sekolah). Pentingnya penanaman dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi melalui *hidden curriculum* didasarkan pada ketentuan bahwa sekolah merupakan lingkup mikro yang memiliki posisi strategis dari sebuah sistem yang ada di masyarakat.

b) *Overt Curriculum*

Penanaman dan sosialisasi nilai antikorupsi juga dapat dilakukan melalui *overt curriculum*, yakni melalui kurikulum yang dikemas dengan mengintegrasikan materi-materi antikorupsi yang dimasukkan dari mulai tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT).<sup>27</sup> Dalam proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi, tidak harus tergantung pada pendidikan agama, moral atau yang lainnya. Semestinya semua mata pelajaran, agama maupun perkuliahan memuat nilai-nilai pembentukan karakter dasar antikorupsi seperti kejujuran, keadilan,<sup>28</sup> tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya.

---

<sup>27</sup> Amin Abdullah, *Nilai-Nilai Perennial...*, aminabd.wordpress.com/2010/06/14, diunduh pada tanggal 12 Juni 2013 pukul 14.30.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Namun demikian, terlebih dahulu para pendidik sangat perlu diberikan pembekalan berupa pendidikan maupun pelatihan khusus secukupnya tentang berbagai hal yang terkait dengan korupsi, baik mengenai perencanaan program, pembuatan kisi-kisi, penentuan atau pemilihan metode pembelajaran dan sumber belajar serta evaluasinya. Hal itu perlu dilakukan agar guru mampu mengajarkan materi antikorupsi tersebut secara tepat, cermat, dan aplikatif.<sup>29</sup>

## 2) Pendekatan Pendidikan Antikorupsi

Dalam tujuan pendidikan antikorupsi, yang penting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai. Sehingga pendekatan pendidikan antikorupsi dapat merujuk pada teori Superka yang telah melakukan kajian dan merumuskan tipologi dari berbagai pendekatan pendidikan nilai yang kemudian dibagi menjadi lima pendekatan.<sup>30</sup> Berikut penjelasan kelima pendekatan tersebut;

### a) Pendekatan penanaman nilai

Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang member penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri peserta didik. pendekatan ini bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu menerima nilai-nilai sosial dan mengubah nilai-nilai peserta didik yang tidak sesuai dengan

---

<sup>29</sup> Suara Merdeka, *Pelajaran Antikorupsi Masuk Sekolah*, [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), 2010, diunduh pada tanggal 12 Juni 2013 pukul 14.30.

<sup>30</sup> Teuku Ramli Zakaria, *Pendekatan-Pendekatan Pendidikan Nilai dan Implementasinya dalam Pendidikan Budi Pekerti*, [www.pdk.go.id](http://www.pdk.go.id), diunduh pada tanggal 2 Juni 2013.



nilai-nilai sosial yang tidak diinginkan. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran ini antara lain keteladanan, penguatan positif dan negative, simulasi, permainan peranan, dan lain-lain.

b) Pendekatan perkembangan moral kognitif

Pendekatan ini menekankan pada aspek kognitif dan perkembangannya dengan cara mendorong peserta didik untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan membuat keputusan-keputusan moral. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan nilai yang lebih tinggi serta mendorong peserta didik untuk berargumentasi dalam memilih nilai dan posisinya dalam masalah moral. Proses pengajarannya mendasarkan pada dilemma moral dengan menggunakan metode diskusi kelompok.

c) Pendekatan analisis nilai

Pendekatan analisis nilai member penekanan pada perkembangan kemampuan peserta didik untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Perbedaannya dengan pendekatan moral kognitif ialah pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial,

sedang pendekatan perkembangan moral kognitif menekankan pada dilemma moral yang bersifat personal.

Tujuan utama pendidikan moral menurut pendekatan ini antara lain untuk membantu peserta didik menggunakan kemampuan berpikir logis dan penemuan ilmiah dalam masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan nilai moral tertentu. Selain itu, pendekatan analisis nilai bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu menggunakan proses berpikir rasional dan analitik dalam mengkorelasikan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai yang ada pada mereka. Selanjutnya, metode-metode pengajaran yang sering digunakan adalah pembelajaran secara individual atau kelompok tentang masalah-masalah sosial yang memuat nilai moral, penyelidikan kepustakaan, penyelidikan lapangan, dan diskusi kelas berdasarkan pada pemikiran rasional.

d) Pendekatan klarifikasi nilai

Pendekatan klarifikasi nilai menitik beratkan pada upaya membantu peserta didik dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu peserta didik agar menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain, mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur

dengan orang lain. Metode yang digunakan dalam proses pengajarannya meliputi metode dialog, menulis, diskusi, baik dalam kelompok besar maupun kecil, dan lain-lain.

e) Pendekatan pembelajaran berbuat

Pendekatan pembelajaran berbuat menekankan pada usaha memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara individual maupun kolektif dalam suatu kelompok. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan peserta didik agar mampu melakukan perbuatan moral (baik individual maupun kolektif) berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri, serta mendorong peserta didik agar mampu melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan sosial dalam interaksi antar sesama manusia. Metode pengajaran yang digunakan ialah metode yang terdapat dalam pendekatan analisis nilai dan klarifikasi nilai. Metode lain yang digunakan ialah proyek-proyek tertentu untuk dilakukan di sekolah atau dalam masyarakat, serta praktek ketrampilan dalam berorganisasi atau yang berhubungan dengan interaksi sesama.

## **2. Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI)**

Istilah "kurikulum" muncul pertama kali di bidang olahraga, berasal dari bahasa Latin: "*Curriculae*", yaitu jarak yang harus ditempuh

oleh seorang pelari.<sup>31</sup> Kurikulum juga bermakna seperti kereta pacu di jaman lampau, yaitu suatu alat yang membawa seseorang dari garis *start* sampai *finish*.<sup>32</sup>

Pada perkembangannya istilah kurikulum kemudian dipakai dalam bidang pendidikan, dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan. Dalam kamus *Webster* tahun 1856 kurikulum diartikan dengan dua macam, yaitu: *Pertama*, sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu. *Kedua*: sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau jurusan.<sup>33</sup>

Pengertian di atas mengindikasikan paham pada waktu itu bahwa kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah, sehingga cenderung *legal oriented*, karena dengan menempuh suatu kurikulum siswa dapat memperoleh ijazah.

Pada dasarnya pengertian kurikulum dapat dilihat secara sempit dan luas. Secara sempit kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari siswa untuk memperoleh ijazah. Sementara itu, dalam pandangan yang luas, kurikulum tidak hanya dibatasi pada sejumlah mata pelajaran yang lebih banyak menekankan pada isi, akan

---

<sup>31</sup> Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 77.

<sup>32</sup> Moh. Yamin, *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2009), hal.21.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

tetapi meliputi semua pengalaman belajar yang dilakukan pihak sekolah untuk mempengaruhi perkembangan pribadi siswa ke arah yang lebih positif sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan.

Oliva dalam Joko Susilo, mengemukakan definisi kurikulum sebagai berikut;

*Curriculum is that which is taught in school, is a set of subject, is content, is a program studies, is a set of materials, is a course of study, is a sequence of courses, is a set of performance objective, is everything that goes on within the school, including extra class activities, guidance, and interpersonal relationships, is that which is taught both inside and outside of school directed by the school, is everything that is planned by school personal, is a series of experiences undergone by learners in school and is that which an individual learner experiences as a result of schooling.*<sup>34</sup>

Definisi di atas tidak hanya mengidentifikasi kurikulum sebagai kegiatan yang berpusat di sekolah, melainkan juga seluruh aspek kegiatan di luar sekolah yang berhubungan dengan proses kegiatan belajar serta hasil pendidikan yang diterima di sekolah. Oleh karenanya, kurikulum juga merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Kurikulum secara praksis adalah apa yang dialami oleh para siswa ketika berada di dalam kelas. Oleh karenanya guru sebagai pendidik yang terjun langsung dalam masalah-masalah pengajaran mempunyai kesempatan yang paling signifikan dalam menjalankan kurikulum.

Secara fungsional kurikulum sebagai suatu proses mempunyai fungsi. Kurikulum pendidikan dibuat agar anak didik berperilaku mulia. Melalui kurikulum, seorang pengajar dapat membentuk karakter dan sikap

---

<sup>34</sup> Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan...*, hal. 80.

seorang anak melalui pelajaran yang diajarkannya. Kesuksesan seorang pengajar dapat dilihat melalui prestasi dan sikap muridnya. Bila anak didiknya pada akhir kurikulum mendapatkan prestasi yang memuaskan, memiliki karakter dan sikap sesuai dengan harapan pengajar, maka pengajar tersebut sukses dalam mendidik.

Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka hal ini berarti bahwa sebagai alat pendidikan kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasinya secara baik. Bagian-bagian ini disebut komponen. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi dalam rangka dukungannya untuk mencapai tujuan itu. Komponen-komponen tersebut meliputi;

a. Komponen Tujuan Kurikulum

Tujuan kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan nasional, yaitu tujuan yang ingin dicapai secara nasional yang dilandasi oleh falsafah suatu negara.<sup>35</sup> Dalam sistem Pendidikan Nasional, tujuan umum pendidikan harus dijabarkan dari falsafah Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

Tujuan umum pendidikan nasional masih bersifat umum dan abstrak serta memerlukan jangka panjang dalam pelaksanaannya. Untuk

---

<sup>35</sup> Asep Herry Hernawan, dkk. *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*. (Jakarta : Universitas Terbuka, 2003), hlm. 18.

itu, tujuan umum perlu dijabarkan dalam tujuan kurikulum yang terdiri dari tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional.<sup>36</sup>

1) Tujuan Institusional

Tujuan Institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, artinya apa yang seharusnya dimiliki oleh siswa setelah tamat dari lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, tujuan konstitusional merupakan kemampuan yang diharapkan untuk dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan program studinya pada lembaga tersebut.

2) Tujuan Kurikuler

Tujuan Kurikuler adalah tujuan bidang studi atau mata pelajaran. Bila dilihat secara operasional, maka tujuan kurikuler adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik setelah menyelesaikan atau mempelajari suatu bidang studi atau mata pelajaran.

3) Tujuan Instruksional

Tujuan instruksional adalah tujuan pengajaran yang diharapkan dapat dicapai pada saat terjadinya proses belajar mengajar atau setelah proses pembelajaran.<sup>37</sup>

b. Komponen Isi/ Materi Kurikulum

Isi dari kurikulum adalah materi atau bahan pelajaran dan pengetahuan atau pengalaman belajar yang harus diberikan kepada

---

<sup>36</sup> A. Hamid Syarief, *Pengembangan Kurikulum*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1996), hlm. 82.

<sup>37</sup> Hidayat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), hal. 32.

peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.<sup>38</sup> Isi atau materi kurikulum harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi anak didik (psikologis anak) pada setiap jenjang pendidikan.<sup>39</sup>

c. Komponen Strategi Pelaksanaan Kurikulum

Strategi adalah pola-pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan kurikulum untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.<sup>40</sup>

Dalam strategi pelaksanaan suatu kurikulum, akan tergambar cara-cara pelaksanaan dari komponen-komponen kegiatan proses belajar mengajar yang meliputi penilaian, cara melaksanakan bimbingan dan penyuluhan serta cara mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan.<sup>41</sup>

Strategi pelaksanaan kurikulum memberi petunjuk bagaimana kurikulum tersebut dilaksanakan di sekolah. Oleh karena itu, komponen strategi memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan.

---

<sup>38</sup> Faududdin, dkk., *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta : Dirjen Binbaga Islam, 1994), hlm.53

<sup>39</sup> Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 53.

<sup>40</sup> Mansyur, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta : Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1995), hlm. 17.

<sup>41</sup> Nazhary, *Pengorganisasian, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Deramaga, 1993), hal.11.



#### d. Komponen Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum merupakan penilaian terhadap suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan efisiensi, efektivitas, relevansi, dan produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana tujuan pendidikan tercapai dan sejauh mana proses kurikulum itu berjalan seperti yang diharapkan. Hasil dari kegiatan evaluasi ini dapat dijadikan sebagai umpan balik (*feedback*) untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum selanjutnya.

Selain pengertian dan fungsi kurikulum, ada juga beberapa istilah dalam kurikulum yang sering disebut terutama oleh kalangan guru dalam lingkungan sehari-hari khususnya dalam dunia pendidikan, diantaranya adalah:

##### a. *Ideal Curriculum*

*Ideal curriculum* atau kurikulum ideal adalah kurikulum yang berisi sesuatu yang baik, yang diharapkan atau dicita-citakan sebagaimana dimuat dalam buku kurikulum.

##### b. *Real Curriculum*

*Real curriculum, actual curriculum* atau kurikulum aktual adalah apa yang terlaksana dalam proses belajar mengajar atau yang menjadi kenyataan dalam kurikulum yang direncanakan atau terprogram dalam pendidikan. Kurikulum aktual sebaiknya sama dengan kurikulum ideal, atau setidaknya mendekati kurikulum

ideal walaupun tidak mungkin atau tidak pernah sama dalam kenyataannya.

c. *Hidden Curriculum*

Hidden Curriculum atau kurikulum tersembunyi adalah kurikulum yang terjadi dari segala sesuatu yang mempengaruhi ketika sedang mempelajari sesuatu. Pengaruh ini mungkin dari pribadi guru, dari anak didik itu sendiri, dari karyawan sekolah, atau hal-hal lain yang berada dilingkungan sekolah. Kurikulum tersembunyi muncul ketika sedang berlangsungnya kurikulum ideal atau kurikulum aktual. Kurikulum tersembunyi ini sangatlah kompleks, sulit diketahui dan dinilai.<sup>42</sup>

Untuk pengertian pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.<sup>43</sup> Hal tersebut selaras dengan Undang-undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

---

<sup>42</sup>Hendriono, *Pengertian dan Istilah Kurikulum Pendidikan*, <http://dedehendriono.blogspot.com>, 2010, diunduh pada tanggal 21 Februari 2013 pukul 13.00.

<sup>43</sup> Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1989, hal. 19.

Pengertian pendidikan dapat dibagi menjadi tiga, yakni secara sempit, luas dan alternatif.<sup>44</sup> Definisi pendidikan secara luas adalah mengartikan pendidikan sebagai hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan sepanjang hidup (*long life education*). Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Secara simplistik pendidikan didefinisikan sebagai sekolah, yakni pengajaran yang dilaksanakan atau diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas sosial mereka.<sup>45</sup>

Secara alternatif pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan secara tepat di masa yang akan datang.<sup>46</sup> Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar yang memiliki program-program dalam pendidikan formal, non-formal ataupun informal di sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan

---

<sup>44</sup> Redja Mulyahardjo, *Pengantar pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 3.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 11.

mengoptimalkan pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan secara tepat.

Dalam teori pendidikan terdapat tiga domain dalam taksonomi tujuan pendidikan. *Pertama*, domain kognitif yang menekankan aspek untuk mengingat dan untuk mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yaitu untuk mengkombinasikan cara-cara kreatif dan mensintesis ide-ide dan materi baru. *Kedua*, domain afektif yang menekankan aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu. *Ketiga*, domain psikomotorik yang menekankan pada tujuan untuk melatih keterampilan seperti menulis, teknik mengajar, berdagang, dan lain-lain. Idealnya ketiga domain tersebut selaras dan saling melengkapi.

Pendidikan Agama Islam secara khusus merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual, sosial dan dalam hubungannya dengan alam sekitar berada dalam nilai Islam, yakni norma-norma syari'ah dan akhlak yang mulia.<sup>47</sup>

Dalam pendidikan agama Islam, peserta didik diharapkan bisa memahami dan mengembangkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman agama Islam. Nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang

---

<sup>47</sup>Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam. terj. Hasan Langgulung*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 399.

merupakan dasar bagi materi pendidikan Islam mengingatkan akan kewajiban manusia secara vertikal-transendental (*hablum minallah*) dan horizontal (*hablum minannas*). Nilai-nilai yang terkandung dalam materi pendidikan Islam merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip pendidikan agama Islam yang dijabarkan lebih luas lagi dalam kurikulum.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan mengenai pengertian kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Kurikulum PAI dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;<sup>48</sup> ia merupakan sekumpulan studi keislaman yang meliputi al-Quran-Hadits, Akidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh, dan Kebudayaan Islam.<sup>49</sup>

Dengan kata lain, kurikulum PAI juga dapat diartikan sebagai segala hal yang terjadi dalam proses pendidikan di sekolah yang berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik termasuk di dalamnya penyusunan dan pelaksanaan ragam materi yang diajarkan dengan menjadikan Islam sebagai pedoman sehingga nantinya diharapkan akan terbentuk anak didik yang konsisten menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman sehingga nantinya diharapkan akan terbentuk anak didik yang konsisten menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidupnya.

Kurikulum PAI mempunyai karakteristik yang khas dan unik, terutama dalam bentuk operasional pengembangan dan pelaksanaannya

---

<sup>48</sup> Khaerudin dalam Rahmat Suharjo, *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2010), hal. 35.

<sup>49</sup> Rahmat Suharjo, *Inovasi Kurikulum...*, hal. 35.

dalam pembelajaran. Karakteristik tersebut dapat diketahui antara lain dari cara guru PAI mengoptimalkan kinerja dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sumber belajar sebagai tenaga profesional.<sup>50</sup> Terkait dengan karakteristik kurikulum PAI tersebut, Azyumardi dalam Rahmat Raharjo menjelaskan bahwa kurikulum PAI mempunyai beberapa karakteristik yang dapat diuraikan sebagai berikut: (a) penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut atas dasar ibadah kepada Allah yang berlangsung sepanjang hayat; (b) pengamalan ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Allah swt. dan masyarakat; (c) pengakuan adanya potensi dan kemampuan pada diri peserta didik untuk berkembang dalam suatu kepribadian yang utuh; dan (d) setiap pencari ilmu dipandang sebagai makhluk Tuhan yang perlu dihormati dan disantuni agar potensi-potensi yang dimilikinya dapat terakumulasi dengan baik.<sup>51</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yang bersifat deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang paling dasar dan ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.

---

<sup>50</sup> E. Mulyasa dalam Rahmat Suharjo, *Inovasi Kurikulum...*, hal. 38.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 38.

## 2. Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini didasarkan pada dua sumber data; yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang pertama kali diteliti dan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul, juga data dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku ataupun tulisan yang membahas mengenai pendidikan antikorupsi, kurikulum pendidikan, pendidikan moral, dan undang-undang tentang korupsi yang dapat menguatkan argumen pendidikan antikorupsi.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi:

### a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>52</sup> Sebagai metode ilmiah observasi sering diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986), hal. 70.

<sup>53</sup> Winarto Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hal 140.

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Wonokromo Bantul.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.<sup>54</sup>

Wawancara juga diartikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu dan percakapan dengan tujuan.<sup>55</sup> Kelebihan teknik wawancara adalah penanya dapat menerangkan secara detail pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.<sup>56</sup>

Metode ini digunakan untuk menggali data-data dari guru Pendidikan Agama Islam, Kepala Sekolah, dan siswa SMA Negeri 1 Kasihan Bantul. Melalui metode ini, penulis akan memperoleh data-data tentang sejarah dan gambaran umum SMA Negeri 1 Kasihan Bantul, pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam hubungannya dengan implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran.

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: alfabeta, 2009), hal. 317.

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 186.

<sup>56</sup> M. Hariwijaya dan M Biri M. Jaelani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis*, (Yogyakarta: Zenith, 2006), hal. 45.



### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>57</sup> Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini, sebagai upaya mencari data yang sah dari bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>58</sup> Analisis data bertujuan untuk mengelompokkan, membuat sistematis, dan mengorganisasikan data sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang berangkat mendeskripsikan realita fenomena sebagai apa adanya terpisah dari perspektif subjektif.<sup>59</sup>

Data penelitian kualitatif banyak menggunakan kata-kata, maka analisis yang digunakan penulis melalui:

---

<sup>57</sup> Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hal. 221.

<sup>58</sup> Masri Sirga Rimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1995), hal. 192.

<sup>59</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 102.

a. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan dirangkum dan dipilih sesuai dengan topik penelitian, disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian.

b. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian deskriptif yang panjang, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Oleh karena itu, dalam penyajian data diusahakan secara sederhana sehingga mudah dipahami dan tidak menjemukan untuk dibaca.

c. Kesimpulan (*verivication*)

Pengambilan kesimpulan dilakukan secara sementara, kemudian diverifikasikan dengan cara mempelajari kembali data yang terkumpul. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama menulis dan merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan.

5. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar

data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding data itu.<sup>60</sup>

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat beberapa teknik, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penelaahan penelitian ini, maka peneliti membuat rancangan secara sistematis yang ditulis menjadi lima bagian dan masing-masing bagian sebagai bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>60</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 330.

Bab II Gambaran umum tentang sekolah yang meliputi letak geografis, sejarah berdiri dan perkembangannya, struktur organisasi, keadaan guru dan staf/karyawan, keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarananya.

Bab III merupakan inti laporan penelitian yang menyajikan sekaligus menganalisis data. Berisi tentang telaah nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul serta implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah, saran-saran, dan kata penutup.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul juga mengenai implementasinya dalam pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di SMA tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Beberapa nilai antikorupsi yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan adalah: a) Kejujuran, b) Keadilan, c) Tanggung Jawab, d) Kedisiplinan, e) Kerja Keras, f) Peduli, g) Berani, h) Sederhana, dan i) Mandiri. Nilai-nilai di atas merupakan nilai yang diajarkan oleh Pendidikan Agama Islam yang kini sudah menjadi nilai universal. Fungsi nilai di atas dalam kaitannya dengan antikorupsi adalah sebagai pembentuk karakter peserta didik agar nilai yang diyakini kebenarannya tersebut dapat menjadi tameng atau pelindung generasi penerus bangsa dari tindakan korupsi dan bahaya laten yang ditimbulkannya.
2. Implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kasihan dilakukan oleh guru dengan menekankan nilai-nilai tersebut di atas ketika menjelaskan muatan Pendidikan Agama Islam. Guru juga memberikan wawasan terkait materi-materi antikorupsi kepada peserta didik di sela-sela materi pokok, sebagai pengantar dalam

menyampaikan materi atau bahkan sebagai ulasan dan kesimpulan dari materi pokok yang ada. Materi pendidikan antikorupsi diintegrasikan dalam materi PAI dengan SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar) yang relevan dengan unsur nilai antikorupsi. Integrasi yang dilakukan bersifat *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi, sehingga termasuk di dalamnya juga nilai keteladanan, sikap, dan pembiasaan yang tengah diupayakan sekolah. Dalam pelaksanaan pembelajaran, para siswa dituntut aktif atau guru memberikan pancingan melalui pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu agar para siswa tertarik untuk aktif terlibat dalam bertanya ataupun berdiskusi. Pembelajaran nilai-nilai antikorupsi pun menjadi lebih menarik perhatian siswa karena guru mengaitkan nilai-nilai antikorupsi yang terkandung dalam muatan kurikulum PAI dengan contoh-contoh aktual (*up to date*) mengenai isu-isu nasional yang sedang menimpa negeri tercinta ini.

## **B. Saran-Saran**

Melalui penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran untuk direspon sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan pendidikan. Pada poin ini, peneliti menyampaikan saran kepada pemerintah, sekolah/kepala sekolah juga para guru/pendidik termasuk para calon pendidik, yaitu:

### **1. Pemerintah**

- a. Mengupayakan segera integrasi pendidikan antikorupsi pada seluruh lembaga pendidikan, baik lembaga formal maupun non formal.

- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang telah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi.
  - c. Memberikan pembekalan bagi para guru berupa pendidikan maupun pelatihan khusus tentang berbagai hal yang terkait dengan korupsi, baik mengenai perancangan program, pembuatan kisi-kisi, penentuan atau pemilihan metode pembelajaran dan sumber belajar, bahkan sampai pada tahap evaluasinya.
2. Sekolah/ Kepala Sekolah
- a. Seyogyanya, pendidikan antikorupsi diintegrasikan tidak hanya dalam pembelajaran atau dalam *hidden curriculum* saja, tetapi juga dalam kurikulum ideal atau kurikulum terprogram sekolah, sehingga pelaksanaannya pun akan lebih terprogram, lebih sistematis, dan lebih jelas.
  - b. Senantiasa memonitor para guru dalam hal penyampaian nilai antikorupsi kepada peserta didik.
3. Guru/Pendidik dan Calon pendidik
- a. Seorang pendidik seharusnya mampu membekali peserta didik dengan keterampilan atau kompetensi yang bisa mendorong mereka menjadi pribadi yang antikorupsi, karena problem korupsi saat ini menjadi problem yang sedang sangat menuntut adanya upaya pemecahan secara mendesak. Sehingga penting bagi guru untuk menjadikan pendidikan antikorupsi tidak saja terintegrasi dalam pembelajaran

melalui *hidden curriculum*, tetapi juga menyuratkannya dalam ideal kurikulum, minimal dalam silabus atau RPP atau dalam bahan ajar.

- b. Seorang pendidik harus mampu menjadi partner sekaligus fasilitator yang baik bagi peserta didik agar pembelajaran dapat berjalan secara komunikatif-interaktif. Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti saat di lapangan, suasana dalam pembelajaran akan menjadi lebih hidup dan tidak membosankan ketika guru mengajak dialog peserta didik tentang problem-problem kontemporer serta pemecahannya.
- c. Seorang pendidik, khususnya pendidik agama Islam, diharapkan mampu mendorong dan memotivasi peserta didik agar bisa mengaplikasikan ilmu agamanya ke dalam kehidupan pribadi maupun masyarakatnya. Aksentuasinya adalah pada aplikasi nilai-nilai keislaman agar dapat menghadapi tantangan dan problematika kontekstual-global.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Namun karena adanya keterbatasan dari pihak penulis, maka skripsi ini pasti lah jauh dari kesempurnaan. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan di sana sini, baik dari segi isi maupun penulisan. Sehingga peneliti sangat mengharapkan saran yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan yang ada, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para



pembaca umumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan terhadap apa yang kita lakukan. *Âmîn Yâ Rabbal 'Âlamîn.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Nilai-Nilai Perennial Agama untuk Masyarakat dan Pemerintah Bebas Korupsi: Timbal Balik antara Teori dan Praktek*, aminabd.wordpress.com/2010/06/14, diunduh pada tanggal 12 Juni 2013 pukul 14.30.
- Ansori, Bantan, *Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Tingkat SMA*”, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Asril, Sabrina, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Kalah dari Timor Leste*, 2012, kompas.com, diunduh pada tanggal 31 Maret 2013 pukul 14.00.
- Dawam, Ainurrafiq, *Hidden Curriculum dalam Islam*, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 6, No. 2, Juli 2005, hal. 257
- Fauzuddin, dkk., *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1994.
- Hariadi, Abdul Majid, *Kurikulum Pendidikan Antikorupsi*, Tribunnews.com, 2011, diunduh pada tanggal 2 Juni 2013 pukul 19.30.
- Hamzah, Andi, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hendriono, *Pengertian dan Istilah Kurikulum Pendidikan*, <http://dedehendriono.blogspot.com>, 2010, diunduh pada tanggal 21 Februari 2013 pukul 13.00.
- Hernawan , Asep Herry, dkk. *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta : Universitas Terbuka, 2003.
- Hariwijaya, M. dan Bisri M. Jaelani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis*, Yogyakarta: Zenith, 2006.
- Himawan, Ari, *Bentuk Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Atas*, Skripsi, Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Jalaluddin, dkk, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Kesuma, Dharma dkk, *Pendidikan Karakter, Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

- Kurniawan, Hendy, *Pelajar DIY Siap Hadirkan Busyro di Seminar Nasional, Komunitas Pohon Antikorupsi Kesulitan Dana*, Tribun Jogja tanggal 30 April 2013, hal. 9 dan 12.
- Mansyur, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1995.
- Marimba, Ahmad D, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1989.
- Minnafiah, Ulum, *Pendidikan Antikorupsi Bukan Hanya Transformasi Konseptual*, Okezone.com, 2012, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2012 pukul 14.25.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- MS, Titus, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Mufid, *Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Islam*, Skripsi, Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Mulyahardjo, Redja, *Pengantar pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulyana, Rohmat, *Mengartikulasi Pendidikan Nilai*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Nasir, Ridlwan, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, IAIN Press dan LKiS, 2006.
- Napitupulu, Ester Lince, *KPK Luncurkan Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Anak Usia Dini*, Kompas.com, 2012, diunduh pada tanggal 21 November 2012 pukul 10.15.
- Nazhary, *Pengorganisasian, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Deramaga, 1993.
- Nubowo, Andar dan Rosita Susi Aryanti, *Membangun Gerakan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan*, Yogyakarta: LP3 UMY, 2004.

- Nugroho, Heru, *Mungkinkah Pendidikan menjadi Alternatif Pemberantasan Korupsi?*, (Yogyakarta: KAUB, LP3 UMY dan Yogya Corruption Watch, 2004), hal. 11.
- Nurdin, Syafruddin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Oemar, Ira, *Refleksi Badai di Tubuh Partai Demokrat*, [www.politik.kompasiana.com](http://www.politik.kompasiana.com), 2012, diunduh pada tanggal 14 Maret 2013 pukul 13.00.
- Purwadaminata, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Purwanto, Ngalim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Rimbun, Masri Sirga dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1995.
- Soetomo, Hidayat dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharjo, Rahmat, *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2010.
- Suhendi, Adi, *KPK–Kemendikbud Kerjasama Terapkan Pendidikan Antikorupsi*, [Tribunnews.com](http://Tribunnews.com), 2012, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2012 pukul 14.25.
- Sukmadinata, Nana Syaodah, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009
- Surahmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Susilo, Muhammad Joko, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- al-Syaibani, Omar Muhammad al-Toumi, *Falsafah Pendidikan Islam*. terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Syarief, A. Hamid, *Pengembangan Kurikulum*, Surabaya: Bina Ilmu, 1996..

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), *Pemerintah Luncurkan Langkah-Langkah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi 2012*, <http://www.ukp.go.id>, 2012, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2012 pukul 14.30.

Wibowo, Ary, *Indonesia Peringkat Ke-100 Indeks Persepsi Korupsi 2011*, [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), 2012, diunduh pada tanggal 19 Oktober 2012 pukul 15.30.

Yamin, Moh., *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, Yogyakarta: DIVA Press, 2009.

Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter, Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.